



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALEXANDER MARWATA
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 65399

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.044.036.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/180 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.044.036.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 650 m2/200 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 414.500.000**

1. LAINNYA, --- (SEPEDA ONTHEL SPORT) SEPEDA Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
2. MOTOR, HONDA KIRANA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA SUV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 172.550.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 540.397.576****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 796.661.711****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 4.968.145.287**

III. HUTANG **Rp. 1.000.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.968.145.287

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.